

Analisis Dampak Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah

Sixson Roberto Simangunsong¹, Ahmad Albar Tanjung², Sabda Dian Nurani Siahaan³

¹Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

²Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Medan Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Program Studi Kewirausahaan, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹msixson@yahoo.com

Submitted: 30/10/2020; Accepted: 21/02/2021; Published: 28/02/2021

Abstrak—Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dana Desa yang diberikan kepada semua desa yang ada di Kabupaten Tapanuli tengah memberikan harapan agar terwujudnya pembangunan di desa. Pentingnya menjadikan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan didukung bahwa sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Penelitian ini dikelompokkan dalam jenis penelitian kuantitatif. menggunakan regresi panel data *time series* dengan variabel-variabel indeks pembangunan manusia, dana desa, dan produk domestik regional bruto. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui portal Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F-hitung 244.8101, dengan variabel dana desa memiliki nilai koefisien positif 0.042406 dan t-hitung 0.539340, produk domestik regional bruto senilai 5.188551 dengan t-hitung 11.91530 yang artinya kedua Variabel tersebut sama sama memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tapanuli tengah, disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kata Kunci: Dana Desa, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract—The village is the government agent at the forefront of implementing development, because development at the village level is directly related to the community. The Village Fund given to all villages in Tapanuli Regency provides hope for the realization of development in the village. The importance of making village communities as the main actors of development is supported that most of the village communities live in poverty and helplessness. The aim is to provide opportunities for regional capabilities and rural areas as the backbone of the regional and national economy. This research is grouped into quantitative research types. using time series data panel regression with human development index variables, village funds, and gross regional domestic product. The data analysis technique used is data analysis with quantitative methods with secondary data collection through the portal of the Central Bureau of Statistics of Central Tapanuli Regency. The results showed that the F-count value was 244.8101, with the village fund variable having a positive coefficient value of 0.042406 and t-count 0.539340, the gross regional domestic product was valued at 5.188551 with a t-count 11.91530, which means that the two variables had the same positive influence on the development index. In Tapanuli Tengah Regency, it is concluded that these two variables can increase the human development index in Central Tapanuli Regency.

Keywords: Village Funds, Gross Regional Domestic Product, Human Development Index

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Desa merupakan wilayah basis yang mana sebagian besar masyarakat Indonesia Tinggal, pembangunan pedesaan dianggap sebagai bentuk pembangunan yang bersifat *bottom-up* atau pembangunan partisipatif (Mustanir dan Abadi, 2017). Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan meningkatkan keterjangkauan pembangunan di wilayah tertinggal, terdalam dan terluar adalah melalui Kebijakan Dana Desa (Mutolib, 2019). Dalam pelaksanaan pembangunan, aspirasi masyarakat khususnya masyarakat desa merupakan syarat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam pembangunan pedesaan, masyarakat desa merupakan objek sekaligus objek yang partisipasinya menjadi hal utama dalam mendukung pembangunan. Peranan pemerintah dalam pembangunan desa adalah sebagai fasilitator dan motivator. Kebijakan Dana Desa ialah salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk membangun desa yang belum tersentuh pembangunan, desa masih banyak yang tertinggal dari pembangunan sehingga diperlukan pemberian bantuan langsung ke setiap desa, Dana desa telah menjadi program pemerintah untuk mendukung pembangunan di desa, Pentingnya menjadikan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan didukung bahwa sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan (Nasar, 2016), sehingga perlunya mendorong masyarakat untuk mampu membangun dirinya sendiri dan keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terkait prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat diharapkan dapat berkreaitivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerahnya serta memprakarsai pembangunan daerahnya. Salah satu upaya mempercepat perekonomian desa yaitu, pemerintah mendorong desa untuk mengembangkan suatu badan usaha milik desa dengan memberikan stimulus berupa dana desa . Menurut Permendagri No 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang mana pengelolaan dan permodalannya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah desa, dan juga masyarakat desa. Tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Pendirian BUMDes berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 dalam BAB X pasal 87-90 yang menjelaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya dalam hal ini adalah Indeks Pembangunan Manusianya. Selain Dana Desa, yang dapat memberikan dampak untuk meemajukan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan hasil nilai tambah bruto yang timbul dari aktivitas perekonomian didaerah, Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melihat dampak dari dana desa yang sudah dibahas di latar belakang dalam melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan Masyarakat desa di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Rahayu, 2018) Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama dari penyaluran dana desa ini terletak pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Dengan tujuan Dana Desa ini diberikan untuk mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini.

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang harus diberikan kepada Desa yakni Alokasi Dana Desa (ADD). (Hariyanto & Mutiarin, 2015)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Maka, dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional untuk membangun desa.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto ialah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB berarti bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB yang meliputi: Upah dan gaji, Bunga, Sewa tanah, Pajak tidak langsung, Penyusutan, dan Keuntungan.

Berdasarkan Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan ekonomi di suatu daerah dalam suatu

periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku atau disebut dengan harga pasar saat itu pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga berlaku. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. (Gallyn Ditya Manggala, 2019)

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia ini telah menjadi tolak ukur perkembangan Manusia di dunia, Orientasi pembangunan sendiri telah bergeser dari pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan beralih menjadi kepada pembangunan manusia. Selain itu indeks ini juga nantinya menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya (Garibaldi, 2015).

Menurut UNDP (1990) Pembangunan manusia ialah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (a process enlarging people's choices), dan tiga pilihan utama yang dianggap paling penting, yaitu diantaranya adalah panjang umur dan sehat (longevity), berpendidikan/berpengetahuan (knowledge), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (living standard). (Gallyn Ditya Manggala, 2019)

2.2 Penelitian Relevan

Penelitian oleh Gallyn Ditya Manggala yang berjudul Pengaruh Dana Desa Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, yang menjelaskan Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dana desa dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh yang positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Barat, yang berarti Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten / Kota di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara parsial variable dana desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sementara itu untuk variable PDRB pangaruhnya adalah positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Jawa Barat. Tentunya penelitian ini mendukung penelitian yang sedang diteliti oleh penulis pada karya tulis ini.

Selanjutnya Penelitian oleh Hadi Sasana Pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan Perkapita terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga mendukung penelitian terkait yang sedang dilakukan penulis

Hal Ini Juga Senada Dengan Penelitian M. Rimawan, Fenny Aryani Berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima, yang menganalisis dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Kabupaten Bima. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS dengan bantuan alat uji statistik menggunakan WARP PLS 3.0. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dan penelitian tersebut sejalan dengan senada dengan judul penelitian yang diteliti penulis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan analisis data panel time series, jenis penelitian korelasional maka desain penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun sifat dari penelitiannya adalah mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini ada tiga variabel yang terlibat, variabel pertama (variabel bebas) yaitu **Dana Desa**, dan Variabel kedua **Produk Domestik Regional Bruto** diperkirakan menjadi sebab atau pengaruh terhadap variabel variabel terikat yaitu **Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah**.

- a. Variabel Bebas (X1) : Dana Desa
- b. Variabel Bebas (X2) : Produk Domestik Regional Bruto
- c. Variabel terikat (Y) : Indeks Pembangunan Manusia

3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan ialah dengan mengumpulkan data Sekunder dari Portal Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 1. Data Dana Desa Tapanuli Tengah 2010 sampai 2019

Dana Desa	Pendapatan	Belanja
2010	Rp. 11382543	Rp. 11382543
2011	Rp. 7521045	Rp. 7521045
2012	Rp. 7044205	Rp. 7037156
2013	Rp. 6555337	Ro. 6552850
2014	Rp. 7078400	Rp. 7078400
2015	Rp. 7054847	Rp. 7054847
2016	Rp. 109105634	Rp. 109102878
2017	Rp. 137383692	Rp. 130595598
2018	Rp. 144650672	Rp. 132326954
2019	Rp. 203147690	Rp. 201983488

Sumber : *BPS Kabupaten Tapanuli Tengah*

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun	Jumlah (Milyar Rupiah)
2010	4.474.324.91
2011	4.899.757.71
2012	5.353.461.87
2013	5.914.046.08
2014	6.516.462.16
2015	7.140.275.90
2016	7.849.653.79
2017	8.545.375.88
2018	9.229.977.21
2019	9.956.777.57

Sumber: *BPS Kabupaten Tapanuli Tengah*

Tabel 3. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah

Tahun	Angka IPM
2010	64.39
2011	65.16
2012	65.43
2013	65.64
2014	66.16
2015	67.06
2016	67.27
2017	67.96
2018	68.27
2019	68.86

Sumber: *BPS Kabupaten Tapanuli Tengah*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Hasil koefisien

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.69877	5.787835	-2.712373	0.0301
LOG(DANADES)	0.042406	0.078626	0.539340	0.6064
LOG(PDRB)	5.188551	0.435453	11.91530	0.0000

R-squared	0.985905	Mean dependent var	66.62000
Adjusted R-squared	0.981877	S.D. dependent var	1.484902
S.E. of regression	0.199897	Akaike info criterion	-0.138702
Sum squared resid	0.279712	Schwarz criterion	-0.047926
Log likelihood	3.693508	Hannan-Quinn criter.	-0.238282
F-statistic	244.8101	Durbin-Watson stat	2.378382
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hasil bahwa variabel- dana desa bernilai positif namun tidak signifikan sedangkan untuk variabel PDRB bernilai positif dan signifikan. Nilai koefisien variabel dana desa sebesar 0.042406 pada hasil regresi dapat diinterpretasikan bahwa dana desa terhadap indeks pembangunan manusia tahun di Tapanuli tengah di tahun 2010- 2019 memiliki hubungan yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Yang berarti bahwa semakin tinggi dana desa maka akan semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut. Selanjutnya Hasil regresi menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan pada nilai dana desa (*ceteris paribus*) sebesar 1 %, maka akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tapanuli tengah sebesar 0.042406 %. Hal ini didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh M. Rimawan, dan Fenny Aryani memperoleh hasil penelitian bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu hasil untuk variabel PDRB diperoleh sebesar 5.188551 , yang berarti bahwa Variabel PDRB berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan pada PDRB sebesar 1 %, maka akan menyebabkan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 5.188551% . Hasil Variabel PDRB ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Gallyn Ditya Manggala yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara parsial variable dana desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sementara itu untuk variabel PDRB pengaruhnya adalah positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Tapanuli tengah. Sedangkan jika dilihat secara simultan kedua variable tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tapanuli tengah. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa aktifitas perekonomian dari aspek PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dalam suatu daerah. Semakin meningkatnya aktifitas ekonomi berarti akan dapat mengangkat kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan mutu Manusia didalam suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal " ACTA DIURNA "* Edisi April 2013, *welfare*, 1–23.
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 29–34.
- Gallyn Ditya Manggala. (2019). Pengaruh Dana Desa (Dd) Dan Produk Domestik Regional Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)*, 1(November), 1–7. <http://ojs-praktisi.ac.id/index.php/jebisis/article/view/2/2>
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0043>
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, I. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.535>
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Suci rahmawati prima. (2017). Dana Desa: Alokasi dan Inefektifitasnya. *Economic*, 19(6), 10.